



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tarif dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
11. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yg terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi karena yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah bukti pembayaran yang sah atas pajak yang telah disetor.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
 - a. jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
 - b. faktor Jarak Tempuh yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jarak Tempuh; dan
 - c. faktor Jenis Konstruksi Menara yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak :
 - a. 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano; dan
 - b. 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano.
- (3) Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jarak Tempuh <50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. jarak Tempuh 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1 (satu) ; dan

- c. jarak Tempuh >100 (lebih dari seratus) kilo meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1,1 (satu koma satu).
- (4) Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. menara Pole atau Tiang Pancang 1 (satu) kaki, sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. menara 3 (tiga) kaki, sebesar 1 (satu); dan
 - c. menara 4 (empat) kaki, sebesar 1,1 (satu koma satu).

Pasal 3

- (1) Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari, menginap 2 (dua) malam di dalam angkutan penyeberangan (kapal), transportasi dari Bengkulu ke Pulau Enggano pergi pulang menggunakan angkutan penyeberangan (kapal), dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3 (tiga) buah.
- (2) Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari, tanpa menginap, dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 2 (dua) buah;
 - b. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari, menginap 1 (satu) malam, dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3 (tiga) buah; dan
 - c. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari, menginap 2 (dua) malam, dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 4 (empat) buah.

- (3) Kecamatan yang berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari wilayah : Kecamatan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Air Besi, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Lais, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Batiknau.
- (4) Kecamatan yang berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika adalah wilayah Kecamatan Ketahun.
- (5) Kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari wilayah : Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, dan Kecamatan Pinang Raya.
- (6) Wilayah Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya alat tulis kantor.
- (4) Uang harian dan biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b besarnya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.
- (5) Biaya transport ke Pulau Enggano dihitung berdasarkan biaya transport dari Arga Makmur ke Kota Bengkulu pergi pulang ditambah biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang untuk penyeberangan sepeda motor dan petugas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diasumsikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per malam.

- (7) Biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diasumsikan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi.
- (8) Penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dapat dilakukan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sesuai jumlah kunjungan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk seluruh menara telekomunikasi yang ada di tiap-tiap kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sesuai jumlah kunjungan selama 1 (satu) tahun untuk seluruh menara telekomunikasi yang ada di tiap-tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tarif retribusi sebesar Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) per tahun.

BAB IV

BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun merupakan perkalian antara indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun berdasarkan indeks variabel jarak tempuh, indeks variabel jenis konstruksi menara, dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (3) Format SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan menggunakan SSRD dalam rangkap 5 (lima) dan Wajib Retribusi mendapatkan bukti TBP.
- (7) Bentuk dan format SSRD serta TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang ada alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 - b. meneliti kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan setelah dilakukan penelitian kembali dan apabila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan;
 - c. menyampaikan laporan hasil penelitian dan pertimbangan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak kepada Bupati;
 - d. penerbitan keputusan, baik permohonan dimaksud diterima atau ditolak; dan
 - e. penyampaian keputusan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Bentuk dan format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian, dengan kegiatan meliputi;
 - a. sosialisasi informasi peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi dan menara telekomunikasi kepada instansi terkait, masyarakat dan penyelenggara menara telekomunikasi;
 - b. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengoperasian menara telekomunikasi baik permasalahan yang bersifat teknis maupun sosial dalam masyarakat;

- c. pendataan menara telekomunikasi dan;
- d. koordinasi dengan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi/lembaga lainnya dan penyelenggara menara telekomunikasi apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRTARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

FITRIYANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG TARIF DAN BESARAN REtribusi
PENGENDALIAN MENARA TELKOMUNIKASI
TAHUN 2023

PENGHITUNGAN KEPERLUAN BIAYA PENGENDALIAN UNTUK TIAP-TIAP KECAMATAN
SEBANYAK 1 (SATU) KALI KUNJUNGAN PER MENARA TERKOMUNIKASI

No	Kecamatan (Jarak dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Km)	Urutan Pengendalian (1 kali)				Biaya Pengendalian (untuk 1 kali kunjungan)				Total Biaya (Rupiah)
		Hari	Jumlah Pengus	Penghapas (Malau)	Jumlah Menara yang dapat dikunjungi	Uang Harian (Rupiah)	Biaya Transport Sepeda Motor (pp)	Biaya Penghapas (Rupiah)	Biaya ATK (Rupiah)	
1	Argamakmur (1 Km)	1	3	0	2	450.000	4.000	-	25.000	479.000
2	Armajaya (12 Km)	1	3	0	2	450.000	48.000	-	25.000	523.000
3	Air Beni (17)	1	3	0	2	450.000	68.000	-	25.000	543.000
4	Air Padang (18 Km)	1	3	0	2	450.000	72.000	-	25.000	547.000
5	Tlg Agung Paik (19 Km)	1	3	0	2	450.000	76.000	-	25.000	551.000
6	Pondang Jaya (20 Km)	1	3	0	2	450.000	76.000	-	25.000	551.000
7	Hulu Paik (24 Km)	1	3	0	2	450.000	94.000	-	25.000	569.000
8	Lah (27 Km)	1	3	0	2	450.000	108.000	-	25.000	581.000
9	Kerkep (28 Km)	1	3	0	2	450.000	110.000	-	25.000	585.000
10	Gat Malya (40 Km)	1	3	0	2	450.000	156.000	-	25.000	631.000
11	Air Nappal (40 Km)	1	3	0	2	450.000	158.000	-	25.000	631.000
12	Batikanau (43 Km)	1	3	0	2	450.000	168.000	-	25.000	643.000
13	Ketahun (62 Km)	2	3	1	3	900.000	242.000	600.000	25.000	1.767.000
14	Ulok Kupai (105 Km)	2	3	2	3	1.350.000	410.000	1.200.000	25.000	2.985.000
15	Puht Hjiu (125 Km)	3	3	2	3	1.350.000	488.000	1.200.000	25.000	3.063.000
16	Nappal Pauh (127 Km)	3	3	2	3	1.350.000	496.000	1.200.000	25.000	3.071.000
17	Marga Sakel Sebet (131 Km)	3	3	2	3	1.350.000	512.000	1.200.000	25.000	3.087.000
18	Pimang Raya (133 Km)	3	3	2	3	1.350.000	520.000	1.200.000	25.000	3.095.000
19	Enggano	3	3	0	3	1.350.000	1.082.000	-	25.000	2.457.000

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setelakab Bengkulu Utara

BUPATI BENGKULU UTARA,

titd

IKSAJAYAH YURDI, S.H., M.H.
Pembina (V/a)
NIP. 198107282002122002

MIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 TAHUN 2023

PENGHITUNGAN KEPERLUAN BIAYA PENGENDALIAN UNTUK TIAP-TIAP KECAMATAN SESUAI JUMLAH KUNJUNGAN
 SELAMA 1 (SATU) TAHUN UNTUK SELURUH MENARA TELEKOMUNIKASI YANG ADA DI TIAP-TIAP KECAMATAN

No	Kecamatan (Jarak dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Km)	Biaya Pengendalian untuk 1 kali Kunjungan per Menara (Rupiah)	Pengendalian dalam 1 Tahun		Kebutuhan Biaya Pengendalian dalam 1 Tahun (Rupiah)
			Frekuensi (Kali)	Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan (Gua)	
1	Argamakmur (1 Km)	239.500	2	10	4.790.000
2	Armajaya (12 Km)	261.500	2	6	3.138.000
3	Air Besi (17)	271.500	2	2	1.086.000
4	Air Padang (18 Km)	273.500	2	1	547.000
5	Tjg Agung Palik (19 Km)	275.500	2	4	2.204.000
6	Padang Jaya (20 Km)	276.500	2	9	4.977.000
7	Hulu Palik (24 Km)	284.500	2	2	1.138.000
8	Lais (27 Km)	290.500	2	6	3.486.000
9	Kerkap (28 Km)	292.500	2	3	1.755.000
10	Giri Mulya (40 Km)	315.500	2	6	3.786.000
11	Air Napal (40 Km)	315.500	2	5	3.155.000
12	Batiknau (43 Km)	321.500	2	6	3.858.000
13	Ketahun (62 Km)	589.000	2	16	18.848.000
14	Ulok Kupai (105 Km)	995.000	2	5	9.950.000
15	Putri Hijau (125 Km)	1.021.000	2	13	26.546.000
16	Napal Putih (127 Km)	1.023.667	2	1	2.047.333
17	Marga Sakai Sblt (131 Km)	1.029.000	2	3	6.174.000
18	Pinang Raya (133 Km)	1.031.667	2	8	16.506.667
19	Enggano	819.000	2	3	4.914.000
			Jumlah	109	118.906.000
				Rata-Rata	1.090.881
				Pembulatan	1.091.000

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara


 IRSALIYAH YURIDA, S.H., M.H.
 Pembina[IV/a]
 NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 TAHUN 2023

BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PER TAHUN BERDASARKAN
 INDEKS VARIABEL JARAK TEMPUH, INDEKS VARIABEL JENIS KONSTRUKSI MENARA, DAN TARIF RETRIBUSI

No.	Jarak Tempuh/Kecamatan	Indeks Variabel Jarak Tempuh	Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara	Tarif Retribusi (Rp)	Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per Tahun (Rp)
1.	< 50 Km : Arga Makmur, Arma Jaya, Air Besi, Air Padang, Tanjung Agung Palik, Padang Jaya, Hulu Palik, Lals, Kerkap, Giri Mulya, Air Napal, dan Batangpau				
	a. Menara Pole (Tiang Pancang 1 Kaki)	1.091.000	883.710	1.091.000	883.710
	b. Menara 3 Kaki	1.091.000	981.900	1.091.000	981.900
	c. Menara 4 Kaki	1.091.000	1.080.090	1.091.000	1.080.090
2.	50 - 100 Km : Ketahun				
	a. Menara Pole (Tiang Pancang 1 Kaki)	1.091.000	981.900	1.091.000	981.900
	b. Menara 3 Kaki	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
	c. Menara 4 Kaki	1.091.000	1.200.100	1.091.000	1.200.100
3.	> 100 Km : Ulok Kupat, Putri Hijau, Napal Putih, Marga Sakti Sebelat, Pinang Raya, dan Enggano				
	a. Menara Pole (Tiang Pancang 1 Kaki)	1.091.000	1.080.090	1.091.000	1.080.090
	b. Menara 3 Kaki	1.091.000	1.200.100	1.091.000	1.200.100
	c. Menara 4 Kaki	1.091.000	1.320.110	1.091.000	1.320.110

Salinan ini Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab Bengkulu Utara


 IRSALYAH YURBA, S.H., M.H.
 Pembina(IV/a)
 NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGKULU UTARA,
 ttd

MIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(Jl. Jenderal Sudirman No. 46 Ayo Melawan Korupsi)
 Kode Pos 33611 (Kampung Kencana) Bengkulu - 33611 (Jember) Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu
 Email : dinkominfo@kab.go.id dan bku@kab.go.id | Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 0203000001_001

No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

NAMA :

ALAMAT :

SIWA : MASA RETRIBUSI :

WARUKAL JAWAB TERIMA : TAMBAH :

NO	KODE BENCING	TAMBAH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH Rp.

(jumlah keseluruhan)

Dengan ini :

Pertimbangan :

1. Untuk penyediaan pelayanan melalui Binaokas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkulu Utara oleh Sas Daerah (Bak) Bengkulu Utara yang Ayo Melawan dengan menggunakan Tarif Baku Binaokas (TBB) SKRD ini
2. Apabila SKRD ini tidak akan dianggap sebagai pajak karena tidak bersifat SKRD ini diberikan di kemudian waktu oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 24% per tahun dari besarnya yang terutang.

Ayo Melawan,

SKRD INI DITERTIPKAN/DISETAPKAN MAMPUAN :

Kejaka Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterangan :

Kabupaten Bengkulu Utara

Lampiran No-1 Daftar Urut Objek retribusi

Lampiran No-2 Lembar Ayo Melawan Binaokas

Lampiran No-3 Masing Daftar DA PERSWA

.....

Lampiran No-4 Daftar Urut Ayo

NIP.....

Mengetahui :

Yusika, Wenaso

SIWA
 Nama :
 Alamat :
 Jumlah yang ditagih : Rp.
 Keterangan Peringatan :

Ayo Melawan,
 Perintah

.....

Salinan Secara Digital dikirimkan
 KEPALA BAKUM
 Bengkulu Utara

BUMBU BENGKULU UTARA,

nd

MAN

BERALIHAN SURUT, S.H., M.H.
 Penjabat SKRD
 NIP. 1981072023021.23012



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pahlawan Bengkulu No. 45, Bengkulu 39211
 Email : info@bengkulubengkuluprov.go.id, info@kominfo.bengkulubengkuluprov.go.id
 www.bengkulubengkuluprov.go.id, www.bengkulubengkuluprov.go.id

No.

SURAT TAGIHAN RETRIEWSI DAERAH (STRD)

NPWP :

Tempat dan Tanggal Terbit :

Revisi/No. Terbit/No. Perda :

NO.	JENIS RETRIEWSI	POKOK Rp	SANKSI ADMINISTRASI (Rp) Rp	JUNJUK Rp

REKAPITULASI

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR :

*) Sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan

Tagihan Jabat Sempit :

Tagihan Peralaparan :

Petunjuk :

Untuk Tagihan Himpunan Basah (SHB) ini harus dibayar oleh Induk sejak tanggal diterbitkan

Angg Bengkulu,

KEPADA YB RETRIEWSI DAERAH (STRD) NO. 001/2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

Konsepkan :

Surat No. 1. Untuk Pihak Objek Retriewsi

Surat No. 2. Untuk Pihak Badan/lembaga/Perusahaan

Surat No. 3. Untuk Pihak Badan/lembaga/Perusahaan

Surat No. 4. Untuk Pihak Lain

.....
 NIP.

TANDA TANGAN

NPWP :

Nama :

Alamat :

Angg Bengkulu,

Peraturan

.....

Selamat Menjalani Kegiatan
 KEPALA BADAN HUKUM
 Setingkat Kabupaten Bengkulu Utara

KESEKRETARIS DAERAH, M.H.
 P.
 NIP. 19600719819010000

BUPATI BENGKULU UTARA,

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 46 Kota Mukomuko 38611
 telp: (075) 8223222-2222, 8223223-2222
 email: dikominfo@kabupatembengkulu.go.id, dikominfo@bengkulu.go.id
 Bengkulu - Indonesia, 2023, 15/05/2023

No.

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

BANK :

NOMOR REKENING :

DAKAR CITSIIMA UNIK SEBERSAK :

.....

.....

(DIBAYAR MELALUI) : (.....

.....

.....

Dengan jumlah sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	UANG	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH	

Uang tersebut diterima pada tanggal

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara
 Pengurus Anggaran

Kota Mukomuko,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

- Catatan :
 Lembar No-1 Untuk Denda Objek retribusi
 Lembar No-2 Untuk Mendukung Penerimaan
 Lembar No-3 Kuiting Untuk DAPENDA
 Lembar No-4 Untuk Untuk Asli

Bukhari Basmi Dengan Aktifnya
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Kabupaten Bengkulu Utara

 BUKHARI BASMI, S.S.I, M.H
 Pemula (07/24)
 NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGKULU UTARA,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Arga Makmur 38611
 website : <http://www.kabupatembengkulu.go.id>, <http://www.bengkulu.go.id>
 email : ditas@kabupatembengkulu.go.id / ditas@bengkulu.go.id : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

No.

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI (TBP)

Nama Wajib Retribusi :

NPWP :

Alamat Wajib Retribusi :

Kelurahan / Desa : RT / RW : Kecamatan :

Kabupaten :

Mengetui dan Mengetahui :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
Jumlah Setoran Retribusi			

Tersambung :

Diterima Oleh :
 BENDAHARA PENERIMAAN

Arge Makmur,
 WAJIB RETRIBUSI / PENYETOR

.....
 Nama lengkap dan Cwp

.....
 Nama Lengkap dan tanda tangan

Selamat Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN TEKNIK
 SetdaKab Bengkulu Utara

ERSALYAH YUSNI, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGKULU UTARA,

.....
 MTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Kota Bengkulu 38621
 Telp. (078) 2223333/2223334/2223335, Fax (078) 2223333/2223334/2223335
 www.kabupatembengkulu.go.id, www.bengkulu.go.id
 Email: kabupatembengkulu@bengkulu.go.id, info@bengkulu.go.id

No.

SURAT KESETAPAN RETRIBUSI DARIHATI LEBIH BAYAR (SKRDLH)

NOMOR :

1. Nama Wajib Retribusi	:
2. Alamat	:
		RT RW Kode Pos
3. Nomor Telepon	:
4. NPWP / Nomor Identifikasi Pajak	:
5. Jenis Retribusi	:
6. Nama Objek Retribusi	:
7. Alamat Objek Retribusi	:
8. Masa Retribusi	:
9. Tahun Retribusi	:
10. Jumlah Tenaga Penyelenggara	:

PERHITUNGAN RETRIBUSI

PERDA/WSAL/ATAT	TARIF RETRIBUSI	DAKAR PENGEMBAKIAN RETRIBUSI	BESAR POKOK RETRIBUSI
1	2	3	4
	Rp.	Rp.	Rp.
a. Jumlah Pokok Retribusi			
b. Angka Hasil/Denda/Late Fee/Objek			
c. Jumlah Retribusi Setelah Pokok BAYAR (b+c)			

Terbilang :

PENGANTARAN :

Agarlah keaktifan penyelenggara pokok retribusi tidak dibencukan karena Wajib Retribusi melampaui batas
 maka Wajib Retribusi berlaku atas batas melampaui sebesar 2 % per bulan

Arjo Mahkota,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

.....
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

.....
 NIP.

.....
 Nomor 1-1 Peta Dinas Objek Retribusi
 Nomor 1-2 Matrik Objek dan Lokasi Retribusi
 Nomor 1-3 Surat Ukur dan Peta
 Nomor 1-4 Rincian Objek Retribusi

Batasnya Sesuai Dengan Anggaran
 BUDGET DAERAH TAHUNAN
 Kabupaten Bengkulu Utara

 ARJO MAHOKOTA, S.P., M.M.
 Penjabat SK/ai
 NIP. 198107181007100000

BUMIH BENGKULU UTARA,
